

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Atau dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Mirda Syam, 2018:2 ). Indonesia merupakan sebuah negara dengan daerah dalam jumlah yang banyak dan setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Berbagai perbedaan di setiap daerah regional merupakan konsekuensi dari berbagai variasi geofisik dasar, kondisi sehingga pembangunan perlu dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan perekonomian di setiap daerah regional yang ada (Rlianti, 2017:1)

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus seimbang jangan sampai ada kesenjangan antar daerah yang disebabkan tidak meratanya perhatian pemerintah ke tiap daerah-daerah yang dimilikinya, karena hal tersebut dapat memunculkan potensi disintegrasi antar daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ratri Heningtyas Utami, 2013:3). Era desentralisasi kebijakan dan otonomi daerah seperti sekarang ini, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di beberapa bidang tertentu. Salah satu diantaranya pemerintah daerah memiliki keleluasaann untuk mengembangkan segenap potensi daerah dan mengelola sumber kekayaan alamnya serta menentukan prioritas dan arah program pembangunan ekonomi suatu daerah (Syahputra, 2017).

Pembangunan harus dilakukan secara strategis dan terencana agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan salah satu ide pokok pembangunan yang dikemukakan oleh Siagian, (2005:4) yang menerangkan bahwasannya rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dalam hal ini dimaksudkan agar terjadi peningkatan kemampuan pada suatu daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah sangat memerlukan berbagai macam data statistik sebagai dasar penentuan strategi dan kebijaksanaan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu juga dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Data statistik yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi di suatu daerah salah satu nya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi dengan wilayah terluas diantara enam Provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Jawa Timur dikenal sebagai pusat industri dan keuangan kawasan tengah dan timur Indonesia yang memiliki signifikasi perekonomian yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dari tahun 2014-2019 secara kumulatif mengalami kenaikan dan berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019, pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mencanangkan visi “Jawa Timur Lebih Berkeadilan”. Adil dalam pengertian bahwa pembangunan yang akan dijalankan melalui tata kelola pemerintahan di Jawa Timur dapat mewujudkan kesejahteraan yang merata dan bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan

kondisi awal yang pembangunan juga tidak hanya difokuskan pada pembangunan sektoral, tapi juga perhatian secara stimultan terhadap pembangunan antar kawasan sehingga masing-masing kawasan di Jawa Timur maju dan sejahtera bersamadibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya, dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan (RPJMD 2014-2019). Selain itu. Untuk melihat keberhasilan kerja sama dibidang ekonomi antar daerah di Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada laju pertumbuhan PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah mencakup besaran dan kualitas pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian, representasi dari data PDRB juga dapat digunakan untuk menganalisis suatu perencanaan pembangunan. Grafik 1.1 merupakan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota (persen) tahun 2014-2019.

**Tabel 1..1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timu menurut Kabupaten/kota**  
**(Persen) 2014-2019**

| Kabupaten/ Kota     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Kota Surabaya       | 6,96 | 5,97 | 6    | 6,13 | 6,2  | 6,5  |
| Kabupaten Gresik    | 7,04 | 6,61 | 5,49 | 5,83 | 5,97 | 6    |
| Kabupaten Sidoarjo  | 6,44 | 5,24 | 5,51 | 5,8  | 6,05 | 6,07 |
| Kabupaten Pasuruan  | 6,74 | 5,38 | 5,44 | 5,72 | 5,79 | 5,8  |
| Kabupaten Mojokerto | 6,45 | 5,65 | 5,49 | 5,74 | 5,85 | 5,8  |
| Kabupaten Malang    | 6,01 | 5,27 | 5,3  | 5,43 | 5,56 | 5,4  |
| Kota Malang         | 5,8  | 5,61 | 5,61 | 5,69 | 5,72 | 5,85 |
| Kota Batu           | 6,9  | 6,69 | 6,61 | 6,56 | 6,5  | 6,7  |
| Kabupaten Jombang   | 5,42 | 5,36 | 5,4  | 5,36 | 5,43 | 5,5  |

|                       |      |       |       |       |      |      |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
| Kabupaten Tuban       | 5,47 | 4,89  | 4,9   | 5     | 5,16 | 5,2  |
| Kota Pasuruan         | 5,7  | 5,53  | 5,46  | 5,47  | 5,54 | 5,6  |
| Kabupaten Probolinggo | 4,9  | 4,76  | 4,77  | 4,46  | 4,47 | 4,7  |
| Kabupaten Jember      | 6,21 | 5,36  | 5,23  | 5,11  | 5,23 | 5,6  |
| Kota Probolinggo      | 5,93 | 5,86  | 5,88  | 5,88  | 5,94 | 6    |
| Kota Mojokerto        | 5,83 | 5,74  | 5,77  | 5,65  | 5,8  | 6,2  |
| Kabupaten Banyuwangi  | 5,72 | 6,01  | 5,38  | 5,45  | 5,84 | 5,9  |
| Kabupaten Lamongan    | 6,3  | 5,77  | 5,86  | 5,52  | 5,5  | 5,8  |
| Kota Kediri           | 5,32 | 4,88  | 5,02  | 4,9   | 5,08 | 5,1  |
| Kabupaten Bojonegoro  | 2,29 | 17,42 | 21,95 | 10,26 | 4,41 | 5    |
| Kabupaten Kediri      | 5,32 | 4,88  | 5,02  | 4,9   | 5,08 | 5,2  |
| Kabupaten Nganjuk     | 5,1  | 5,18  | 5,29  | 5,26  | 5,39 | 5    |
| Kabupaten Sampang     | 0,08 | 2,08  | 6,17  | 4,69  | 4,51 | 5    |
| Kabupaten Lumajan     | 5,32 | 4,62  | 4,7   | 5,05  | 5,02 | 5,1  |
| Kabupaten Tulungagung | 5,46 | 4,99  | 5,02  | 5,08  | 5,21 | 5,32 |
| Kabupaten Bondowoso   | 5,05 | 4,95  | 4,97  | 5,03  | 5,09 | 5    |
| Kabupaten Bangkalan   | 7,19 | -2,66 | 0,66  | 3,53  | 4,26 | 4,5  |
| Kabupaten Pamekasan   | 5,62 | 5,32  | 5,35  | 5,04  | 5,46 | 4,5  |
| Kabupaten Sumenep     | 6,23 | 1,27  | 2,58  | 2,86  | 3,58 | 4    |
| Kabupaten Situbondo   | 5,79 | 4,86  | 5     | 5,07  | 5,43 | 4,5  |
| Kota Madiun           | 6,62 | 6,15  | 5,9   | 5,93  | 5,96 | 6    |
| Kabupaten Madiun      | 5,34 | 5,26  | 5,27  | 5,42  | 5,1  | 5,2  |
| Kabupaten Ngawi       | 5,82 | 5,08  | 5,21  | 5,07  | 5,26 | 5,3  |
| Kabupaten Blitar      | 5,02 | 5,06  | 5,08  | 5,07  | 5,1  | 5    |
| Kota Blitar           | 5,88 | 5,68  | 5,76  | 5,78  | 5,83 | 5,15 |
| Kabupaten Ponorogo    | 5,21 | 5,25  | 5,29  | 5,1   | 5,31 | 5,31 |
| Kabupaten Trenggalek  | 5,28 | 5,03  | 5     | 5,02  | 5,03 | 5,32 |
| Kabupaten Pacitan     | 5,21 | 5,1   | 5,21  | 4,98  | 5,51 | 5,6  |
| Kabupaten Magetan     | 5,1  | 5,17  | 5,31  | 5,09  | 5,25 | 5,4  |

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur (Diolah)

Dari Grafik diatas, pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014-2019 yang paling tinggi adalah Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan yang cukup tinggi karena pertumbuhan ini disumbang terbesar oleh sektor pertambangan minyak di Blok Cepu. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah

adalah Kabupaten Bangkalan dikarenakan Pemerintah Bangkalan kurang mengoptimalkan sektor-sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Dalam kurun waktu dari Tahun 2014-2019 pertumbuhan ekonomi di setiap daerah memiliki tren yang positif (terus meningkat). Namun, dari data tersebut sangat terlihat jelas ketimpangan antar daerah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. pemerintah daerah harus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi di setiap daerah di Provinsi Jawa Timur terus meningkat dan merata di setiap daerah. Untuk mempercepat peningkatan pembangunan daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri, yang biasa disebut dengan otonomi daerah (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, 2019 : 10).

Agar dalam pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan optimal, pemerintah harus mengupayakan agar dapat meningkatkan faktor produksi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa timur. Salah satu nya pada sektor Pendapatan Asli Daerah dan Upah Minimum Regional. Dalam teori Sollow Swan dijelaskan bahwa suatu pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki. Jika faktor produksi ini meningkat maka kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi juga akan ikut meningkat. Faktor produksi yang dimaksud didalam teori tersebut adalah akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dalam penelitian ini menghubungkan beberapa faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal dan tenaga kerja.

Akumulasi modal didalam era desentralisasi fiskal, maka setiap pendapatan daerah dapat dijadikan sebagai modal oleh daerah untuk

melakukan kegiatan pengeluaran sehingga nantinya dapat menciptakan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pendapatan daerah salah satunya terdapat Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan modal dalam era desentralisasi maka hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga dapat diketahui bahwa pendapatan daerah merupakan salah satu faktor produksi yang dimiliki daerah untuk menciptakan *output*, sehingga dengan adanya *output* ini nantiya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

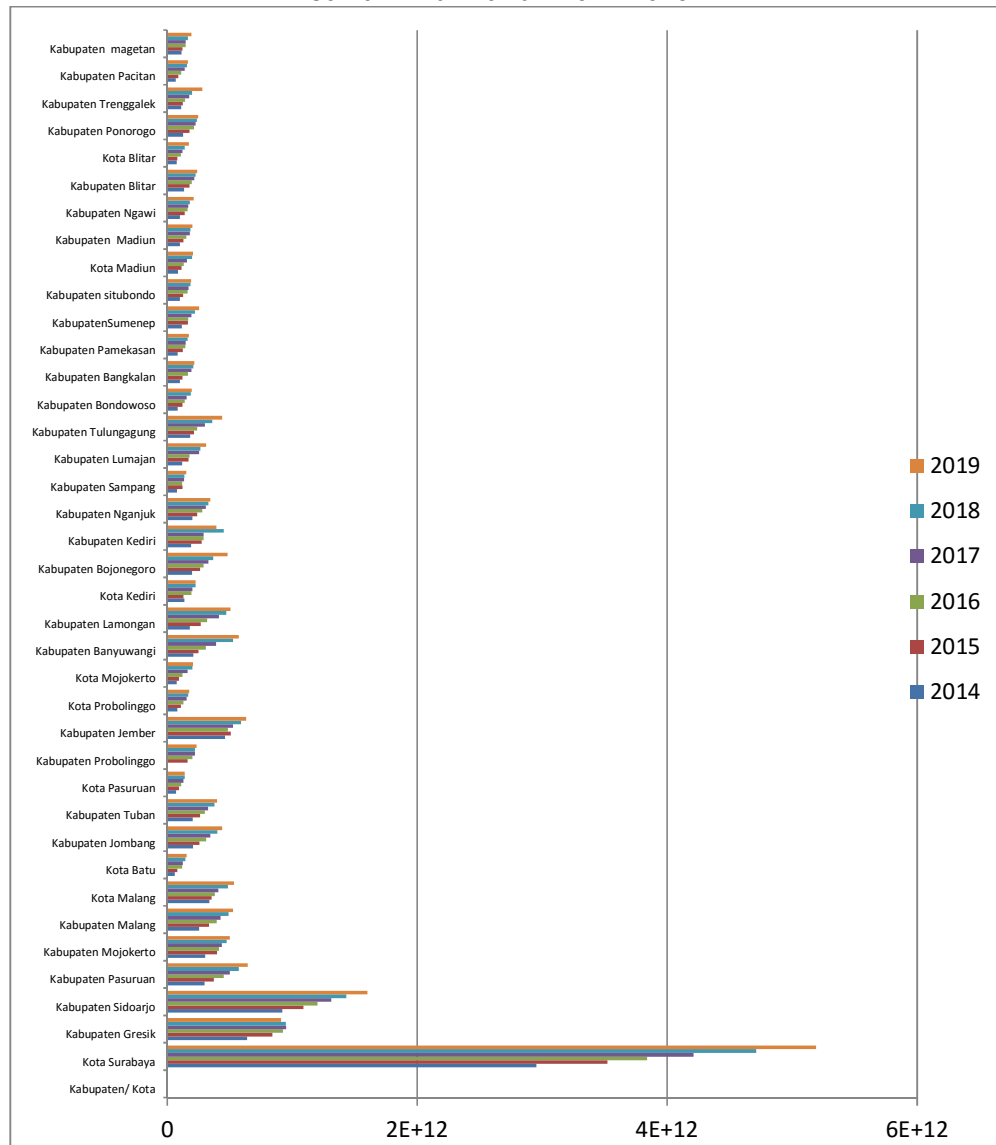
Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. salah satu pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap) (RPJMD 2019-2024).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor

belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

Menurut Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur ( 2019 : 19) Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer yakni dengan mengoptimalkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pada tahun 2019 telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 111 BLUD. Disamping itu pemerintah daerah juga mengembangkan Investasi ke Badan Usaha Milik Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, dan sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. pemerintah disetiap daerah di Provinsi Jawa Timur harus mengoptimalkan potensi daerahnya agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing. Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 :

**Gambar 1.1**  
**Data Pendapatann Asli Daerah (PAD) menurut Kabupaten/Kota Provinsi**  
**Jawa Timur Tahun 2014-2019**



Sumber : Djpk Kementrian Keuangan (Diolah)

Berdasarkan data tabel diatas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur menurut Kabupaten/Kota tahun 2014-2019 yang paling tertinggi yaitu Kota Surabaya dengan nilai pada tahun 2019 sebesar 5.190.295.025.246. dan yang paling rendah yaitu Kabupaten Pacitan dengan nilai pada tahun 2014

sebesar 67.334.102.158. Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 2014-2019 menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dengan meningkatnya Pendapatan Daerah melalui Pajak dan Retribusi Daerah. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah obyek pajak sebagai akibat adanya pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (2019 : 20) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan, namun demikian peningkatan tersebut masih belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan penyelenggaraan pembangunan di daerah. dalam susunan rencana strategis tahun 2019-2024 terdapat berbagai macam masalah dalam peran PAD tahun 2014-2019, seperti masih banyak sarana dan prasarana publik serta infastruktur untuk masyarakat Provinsi Jawa Timur yang belum optimal serta tuntutan pelayanan yang semakin cepat, efisien, dan aman juga masih belum optimal. Sehingga pemerintah harus memperhatikan permasalahan ini agar dapat berdampak positif terhadap perekonomian dan dapat dirasakan masyarakat Provinsi Jawa Timur.

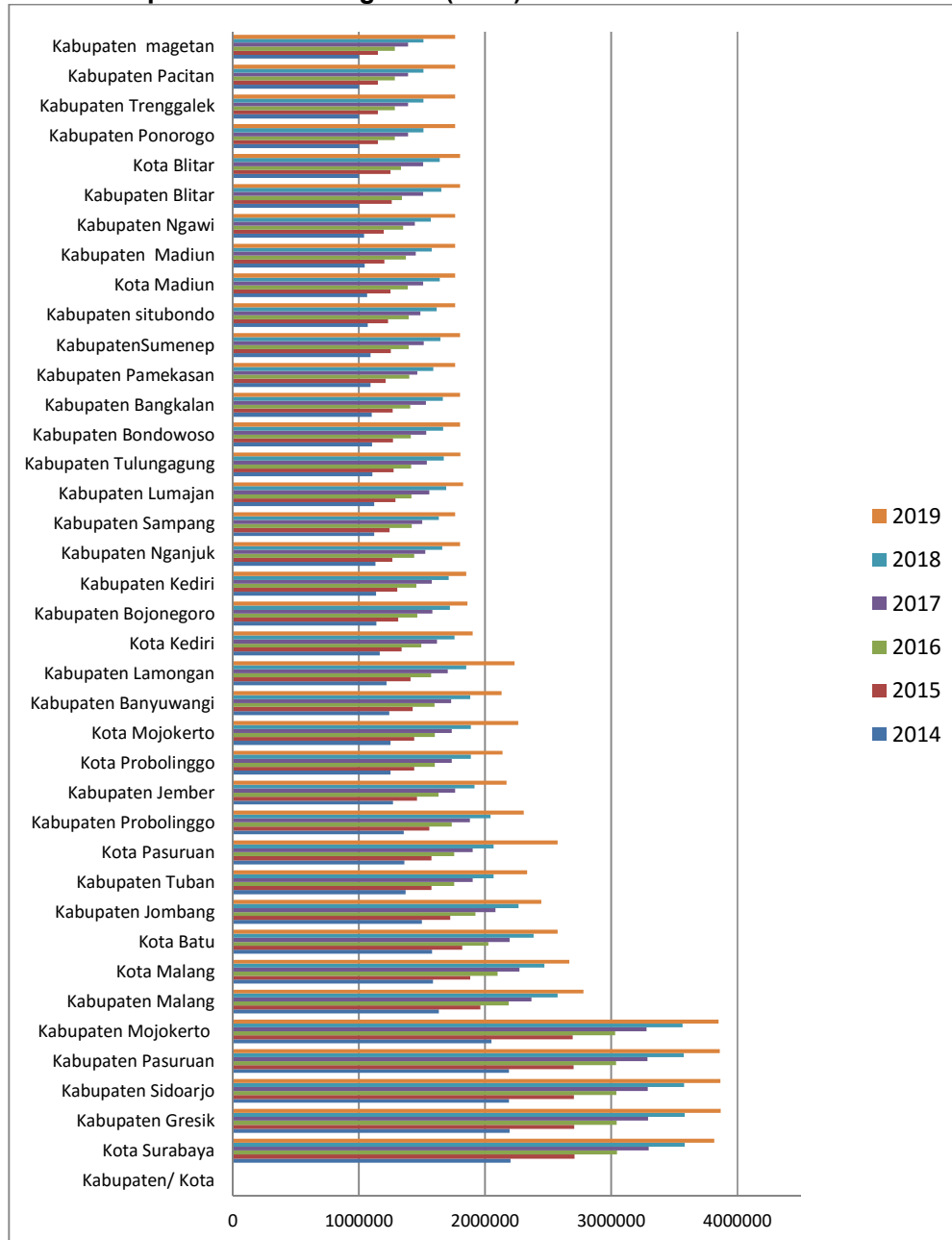
Selain Akumulasi modal sebagai faktor produksi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja juga sebagai faktor produksi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tepatnya pada ranah sumber daya manusia, dan upah merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, Kesejahteraan dan pendapatan nasional bisa meningkat jika masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli hasil produksi dan mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan bisa menurun dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Menurut Rahmah Merdekawaty (2016:5) Produk Domestik Regional Bruto juga menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah, sehingga penetapan upah minimum harus menyesuaikan kondisi ekonomi terkini. Upah Minimum merupakan standar yang digunakan para pelaku insdutri atau pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan kerjanya. (Dasri Lokiman, 2014).

Upah merupakan faktor utama yang dapat mendorong semangat kerja sehingga diharapkan produktifitas perusaha akan semakin meingkat. Tujuan pemerintah dalam menerapkan kebijakan upah minumum adalah untuk meningkatkan perkerja atau buruh yang masih berpendapatan dibawah upah minimum. Seringkali konflik ketenagakerjaan disebabkan salah satunya oleh upah yang diterima pekerja atau buruh belum layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga para pekerja menuntut untuk dibuatkannya peraturan berupa kebijakan upah minimum. Namun pengusaha menghadapi permasalahan dari tuntutan para pekerja karena penawaran upah yang diminta terlalu besar, Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai mediator harus berada ditengah-tengah diantara pihak pekerja dan perusahaan (Faizin, 2015 ; 15).

Melalui kebijakan upah minumum ini upah buruh berusaha diselamatkan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan dan perekonomian pada umumnya (Faizin, 2015 : 15 ). Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mengupayakan agar permasalahan Upah Minumum baik untuk pekerja dan baik untuk para pengusaha atau para pelaku industri. Berikut adalah data Upah Minimum Regional (UMR) Jawa Timur Tahun 2014-2019.

**Gambar 1.2**  
**Data Upah Minimum Regional (UMR) Jawa Timur Tahun 2014-2019**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (Diolah)

Dari data Upah Minimum Regional (UMR) menurut Kabupaten/kota Jawa timur tahun 2014-2019 cenderung mengalami kenaikan pada setiap daerah. Daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat upah paling tinggi yaitu Kota Surabaya sebesar Rp 3.817.052 dan yang paling terendah yaitu Kabupaten Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Magetan yakni sebesar Rp 1.763.267.

Dalam penetapan Upah Minimum Regional masih banyak sekali permasalahan, bahkan hampir setiap tahun banyak para buruh menuntut agar diberikan upah yang layak, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari. disini dibutuhkan peran pemerintah sebagai mediator agar tidak terjadi konflik upah yang berkepanjangan. Melalui kebijakan upah minumum ini upah buruh berusaha diselamatkan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan dan perekonomian pada umumnya.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Karena berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Upah Minimu Regional terhadap pertumbuhan ekonomi dinyatakan secara tidak konsisten karena menimbulkan hasil yang berbeda-beda, sehingga hasil penelitian tersebut belum bisa menentukan faktor-faktor yang secara tepat dapat mempengaruhi variabel Pertumbuhan Ekonomi.

Berikut Pada tabel 1.4 akan disajikan *research gap* penelitian terdahulu :

**Tabel 1.0.2**  
**Research Gap Penelitian Terdahulu**

| <b>Variabel<br/>Dependen</b> | <b>Variabel<br/>Independen</b> | <b>Pengaruhnya</b>          | <b>Penelitian<br/>Terdahulu</b>                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertumbuhan<br>Ekonomi       | Pendapatan Asli<br>Daerah      | Positif Signifikan          | (Eka Putri, 2015)<br>(Yuliana, 2014)<br>(Chandralecha<br>Rahmatus<br>Amelia, Dwi<br>Susilowati, 2019) |
|                              |                                | Negatif Signifikan          | (Aulia Afafun<br>Nisa, 2017)                                                                          |
|                              |                                | Positif tidak<br>signifikan | (Mirda Syam,<br>Dahliah, 2018)<br>(Yasin, 2019)                                                       |
| Pertumbuhan<br>Ekonomi       | Upah Minimum<br>Regional       | Positif Signifikan          | (Ratri Heningtyas<br>Utami, 2013)<br>(Julianto &<br>Suparno, 2016)<br>(Dasri Lokiman,<br>2014)        |
|                              |                                | Positif Tidak<br>Signifikan | (Charysa, 2013)                                                                                       |

Setelah melihat penelitian-penelitian terdahulu dari beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian menunjukkan research gap pada tabel 1.4 yang tidak konsisten (inkonsistensi) dalam hasil penelitian yang masih menunjukkan hasil yang beragam, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan terbaru peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut kembali pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Upah Minimum Regional terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan data yang berbeda yaitu lokasi penelitiannya Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.

Karena pada tahun 2014-2019 dimana pada periode ini pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun RPJMD tahun 2014-2019. dalam penyusunan RPJMD 2014-2019 memperhatikan isu-isu strategis. Isu-isu

strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur dimasa yang akan datang. Dalam isu-isu strategis yang disusun dalam RPJMD tahun 2014-2019 terdapat salah satu nya yaitu kurang optimalnya kinerja pelaksanaan APBD yang mana didalamnya terdapat PAD dan masih tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja.

Oleh karena itu dari latar belakang tersebut penulis meneliti dengan judul **Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Upah Minimum Regional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah tersebut sebagai beriku :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 ?
2. Bagaimana Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 ?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas diperoleh tujuan penelitian tersebut sebagi berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019
2. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Dengan diadakan penelitian ini peneliti manfaat yaitu :

1. Manfaat Bagi Ilmu Ekonomi
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan peneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan upah minimum provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbangsi pemikiran tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan upah minimum provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan untuk peneliti berikutnya
2. Manfaat Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumbangsi informasi mengenai gambaran tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan upah minimum provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.
  - b. Bagi penulis diharapkan dapat mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai penruh pendapatan asli daerah dan upah minimum provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.